



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
SUB UNIT KERJA : BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUSLIM
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO
3. NHK : 221259

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.075.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 143 m²/120 m² di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 300 m² di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 685 m²/300 m² di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 825.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 356.500.000

1. MOBIL, HONDA MOBIL MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
3. MOTOR, HONDA SPM/SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HADIAH Rp. 2.500.000
4. MOTOR, HONDA SPM/SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 295.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 346.539.978**F. HARTA LAINNYA** Rp. 150.000.000**Sub Total** Rp. 4.223.039.978



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.223.039.978

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.